

PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA MUDIK ULO KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Karlita Utari

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : -----@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Apakah Kepemimpinan Kepala Desa Berpengaruh terhadap Pembangunan Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana, koefisien determinasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan angka korelasi R sebesar 0.680 berarti Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Desa terdapat hubungan yang Kuat, dan besarnya persentase pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Pembangunan Desa adalah 46,3% sedangkan 53,7% sisanya yaitu dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Keywords: Kepemimpinan, Pembangunan

Abstract

This research was carried out in Mudik Ulo Village, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine the influence of village chief's leadership in the development of Mudik Ulo Village, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in the study is Does the Village Head's Leadership Affect the Development of Mudik Ulo Village, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique in this study uses Simple Random Sampling, where the sampling of members of the population is done randomly without regard to strata that exist in that population. Analysis of the data used is quantitative descriptive. The analysis used is a simple linear regression analysis, the coefficient of determination. The test results show that there is an Influence of Village Leadership Leaders to Mudik Ulo Village Development, Hulu Kuantan Subdistrict, Kuantan Singingi District, which produces a correlation number R of 0.680, which means that the Leadership of Village Leaders on Village Development has a strong relationship, and the magnitude of the influence of Village Head Leadership on Village Development is 46.3% while the remaining 53.7% is explained by other variables not examined in this study.

Keywords : Leadership, Development

1. PENDAHULUAN

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman desa diatas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.

Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelolan asset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan (dalam Nurman 2015 : 255).

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan. (dalam Moeljarto Tjokrowinoto, 1995:41).

Agar dapat melaksanakan peran dalam mengatur dan mengurus komunitas, desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diberikan kewenangan yang mencakup:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan ploitik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten.

Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena

merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa.

Kepala desa adalah pemimpin tertinggi dalam sebuah pemerintahan desa. Seorang kepala desa hanya menerima koordinasi dari camat, akan tetapi hal tersebut bukan seperti sebuah tanggung jawab kepada camat. Setiap desa di Indonesia memiliki banyak nama lain untuk jabatan kepala desa, sebagai contoh pada wilayah Sumatera Barat kepala desa disebut dengan wali nagari. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun masa kerja dan dapat diperpanjang untuk satu kali jabatan lagi. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat, siapa saja boleh menjadi kepala desa pada sebuah desa selama orang tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah desa. Namun sering kali terjadi kekeliruan antara kepala desa dengan lurah. Perbedaannya adalah lurah merupakan pegawai negeri sipil yang mempunyai tanggung jawab kepada camat, sedangkan kepala desa boleh menjadi salah satu dari anggota politik, akan tetapi tidak boleh menjadi pengurus dari partai politik.

Kepala desa memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin untuk menjalankan program pembangunan di desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat desa, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pengaruh kepemimpinan kepala desa erat hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu pemerintahan desa. Oleh karena itu, perilaku kepemimpinan kepala desa selalu dihubungkan dengan kegiatan kepala desa dalam mengarahkan, memotivasi, menggerakkan anggotanya untuk mewujudkan tujuan pemerintahan desa. Perilaku kepala desa selaku pemimpin yang harus melaksanakan fungsi kepemimpinan di desa, diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pemimpin pemerintahan di desa dalam melayani kepentingan masyarakat. Kepala desa sendiri di haruskan untuk memiliki sertifikat berpendidikan paling rendah tamat SLTP dan/atau sederajat.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, pembangunan desa belum lah maksimal, masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki untuk kedepannya, diantaranya :

1. Pembangunan yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakat.
2. Bukan hanya pembangunan fisik, harus juga memperhatikan pembangunan usaha ekonomi masyarakat.
3. Serta memperhatikan pelayanan kesehatan, dan pendidikan, saat ini untuk PAUD masih menumpang di rumah yang kurang layak untuk dijadikan PAUD.

Berdasar observasi awal yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan kepala desa terhadap pembangunan Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup aktif. Namun masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki untuk kedepannya. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk membuat kajian ilmiah dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan

Kepala Desa Terhadap Pembangunan Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Ilmu Administrasi Negara

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat terlepas dari kegiatan administrasi. Administrasi merupakan salah satu unsur yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan dari berbagai kegiatan.

Kata *Administrasi* juga berasal dari bahasa Belanda dari kata *administratie* yang mempunyai pengertian yang mencakup *stelselmatige verkrijging en verwerking van gegeven* (tatausaha), dan *beheer* (manajemen dari sumber daya, seperti finansial, personal, gudang).

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah tata usaha atau office work yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan, dan sebagainya. Administrasi adalah dua orang atau lebih yang bersatu guna mencapai tujuan secara bersama-sama. (Suprayogi, 2011 : 2).

Menurut Sondang P. Siagian, mengartikan Administrasi Negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara atau dari suatu pemerintahan dalam usaha mencapai tujuan negara tersebut. (dalam Ridwan, 2011:29).

Menurut The Liang Gie, administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penetapan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. (dalam Syafie, 2010: 14).

Menurut Sondang P. Siagian, administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dari pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (dalam Syafie, 2010:14).

Menurut Hugo De Groot, negara adalah suatu organisasi kekuasaan oleh karenanya dalam setiap organisasi yang namanya negara selalu kita jumpai adanya organ atau alat pelengkapan yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kehendaknya kepada siapa saja yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya.

Menurut Miriam Budiardjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui kekuasaan (*control*) monopolistis dan kekuasaan yang sah. (dalam Syafie, 2010:22)

Pengertian administrasi ada dua macam yaitu: administarsi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerjasama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang turut dalam proses, tujuan yang akan tercapai dan pemanfaatan berbagai sumber. (Sondang P. Siagian, 2001: 38)

2.2 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut:

1. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi dan pemberhentian.

2. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang.
3. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya.
4. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh.
5. Melaksanakan pendidikan, latihan dan penilaian produktivitas karyawan.
6. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal.
7. Mengatur pensiun, pemberhentian dan pesangonnya.

Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Cherrington (dalam Irham Fahmi 2014:11) yaitu:

1. *Staffing/Employment*

Fungsi ini terdiri dari tiga aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Sebernya para manajer bertanggung jawab untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia.

2. *Performance Evaluation*

Departement sumber daya manusia dan para manajer. Para manajer bertanggung jawab utama untuk mengevaluasi bawahannya dan departement sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan bentuk penilaian kinerja yang efektif dan memastikan bahwa penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh seluruh bagian perusahaan.

3. *Compensation*

Dalam hal kompensasi/reward dibutuhkan suatu koordinasi yang baik antara departement sumber daya manusia dengan para manajer. Para manajer bertanggung jawab dalam hal kenaikan gaji, sedangkan departement sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan struktur gaji yang baik.

4. *Training and Development*

Departement sumber daya manusia bertanggung jawab untuk membantu para manajer menjadi pelatih dan penasehat yang baik bagi para bawahannya, menciptakan program pelatihan dan pengembangan yang efektif baik bagi karyawan baru (orientasi) maupun yang sudah ada (pengembangan keterampilan), terlibat dalam program pelatihan dan pengembangan tersebut, memperkirakan kebutuhan perusahaan akan program pelatihan dan pengembangan, serta mengevaluasi efektifitas program pelatihan dan pengembangan.

5. *Employee Relations*

Dalam perusahaan yang memiliki serikat pekerja, departement sumber daya manusia berperan aktif dalam melakukan negosiasi dan mengurus masalah persetujuan dengan pihak serikat pekerja. Membantu perusahaan menghadapi serikat pekerja merupakan tanggung jawab departement sumber daya manusia.

6. *Safety and Health*

Setiap perusahaan wajib untuk memiliki dan melaksanakan program keselamatan untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dan menciptakan kondisi yang sehat. Tenaga kerja perlu diingatkan secara terus menerus tentang pentingnya keselamatan kerja. Suatu program keselamatan kerja yang efektif dapat mengurangi jumlah kecelakaan dan meningkatkan kesehatan kerja secara umum dan memberikan rasa nyaman kepada para pekerja.

7. *Personnel Research*

Dalam usahanya untuk meningkatkan efektifitas perusahaan, departement sumber daya manusia melakukan analisis terhadap tanggung jawab utama departement sumber daya manusia adalah untuk menghindari praktek-praktek yang tidak sehat (misalnya: mogok kerja, demonstrasi). Dalam perusahaan yang tidak mempunyai serikat kerja departement sumber daya manusia dibutuhkan untuk terlibat dalam hubungan karyawan. Secara umum,

para karyawan tidak bergabung dengan serikat kerja jika gaji mereka cukup memadai dan mereka percaya bahwa pihak perusahaan bertanggung jawab terhadap kebutuhan mereka.

2.3 Teori/Konsep Organisasi

Menurut E. Wight (dalam Kurdi 2011:5) organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan kepentingan tersebut, maka suatu organisasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Organisasi merupakan suatu sistem sosial, yang terdiri dari dua orang atau lebih sehingga terjadi interaksi antar individu.
2. Dikoordinasikan secara sadar dan fungsi dalam suatu dasar yang terus menerus. Koordinasi yang dilakukan secara sadar mencakup koordinasi usaha, suatu tujuan bersama, pembagian tenaga kerja, dan hierarki wewenang yang membentuk struktur organisasi.
3. Organisasi dibentuk untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan. Ada organisasi yang tujuan untuk mencari laba ada juga yang *non profil*.

Teori-teori dalam konsep ilmu administrasi negara mengenai berbagi atas teori-teori yang menjelaskan organisasi-organisasi non modern (*naturalistic organisation, naturalistic organisaties*) dan organisasi-organisasi modern yang pada umumnya merupakan organisasi-organisasi yang direncanakan (*planned organisation, geplande organisaties*). Teori-teori organisasi non-modern dikembangkan dengan banyak mempergunakan pandangan-pandangan antropologi, sosiologi dan ilmu kebudayaan. Sikap para warga organisasi terhadap pimpinan dan sikap kelakuan mereka yang bersifat serba pribadi atau personal, dapat dipahami melalui ajaran-ajaran antropologi dan sosiologi.

2.4 Perilaku Organisasi

Menurut Wursanto (2003:81) mempelajari perilaku organisasi berarti mempelajari perilaku para anggota organisasi, baik secara individu maupun secara berkelompok. Mempelajari perilaku organisasi bukan mempelajari bagaimana organisasi itu berperilaku, tetapi mempelajari bagaimana para anggota organisasi itu berperilaku. Mempelajari bagaimana para anggota organisasi berperilaku berarti mempelajari perilaku manusia. Memahami perilaku manusia adalah suatu hal yang sulit karena setiap manusia sebagai individu mempunyai perilaku berbeda. Perilaku manusia dapat diperengaruhi dari dua faktor-faktor pendukung, yaitu:

1. Perilaku Internal adalah perilaku-perilaku yang dipengaruhi oleh faktor genetika, yaitu segala hal yang dibawa sejak orang lahir sehingga merupakan warisan dari orang tua.
2. Faktor Eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh faktor dari luar, misalnya faktor lingkungan. Yang dimaksud dengan faktor lingkungan adalah segenap situasi dan kondisi yang dihadapi sehari-hari oleh seseorang dalam hidupnya.

Teori perilaku atau *the hehaviour theory of organisation* berpendapat bahwa ada tidaknya, baik buruknya suatu organisasi itu tergantung dari sikap kelakuan para anggota-anggotanya. Masalah organisasi terpenting menurut pengamat teori-teori adalah bagaimana membuat para warga organisasi itu bersikap, berfikir dan bertindak laku sebagai “manusia organisasi”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan tujuan tertentu atau kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut James D. Money (dalam Inu Kencana Syafie 2010:51) organisasi adalah sebagai bentuk seperti perserikatan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Menurut Usman Effendi (2014:130) organisasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu organisasi formal dan informal. Organisasi formal adalah suatu sistem mengenai aktivitas-aktivitas yang berkoordinasikan dari sekelompok orang yang bekerja sama kearah suatu tujuan bersama. Sedangkan organisasi informal adalah kumpulan hubungan antar perseorangan tanpa tujuan yang disadari meskipun pada akhirnya hubungan-hubungan tak disadari untuk tujuan bersama

2.5 Pengertian Kepemimpinan

Pemimpin adalah seseorang yang memiliki bawahan atau pengikut untuk satu tujuan dan keberhasilan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang dimilikinya. Sedangkan kepemimpinan telah dideskripsikan oleh beberapa pakar merupakan suatu tindakan yang memengaruhi orang lain atau bawahannya agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu sebagaimana dijelaskan dibawah ini : (Edison, dkk 2016 : 89)

1. Schermerhorn : kepemimpinan adalah proses meginspirasi orang lain untuk bekerja keras guna menyelesaikan tugas-tugas penting.
2. Gary Yukl : kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.

Jeff Madura : kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan orang lain demi mencapai sasaran. (dalam Edison, dkk 2017 : 89)

Menurut Emron Edison dkk (2016 : 98-99) ada beberapa karakteristik kepemimpinan transformasional yaitu:

- a. Memiliki strategi yang jelas. Pemimpin melakukan dan memiliki rencana perubahan besar dan terarah terhadap visi, misi dan strategi organisasi serta dikomunikasi dengan baik kepada anggotanya.
- b. Kepedulian. Pemimpin memiliki kepedulian terhadap setiap permasalahan yang dihadapi oleh para anggota dan memotivasi serta perduli.
- c. Merangsang anggota. Pemimpin merangsang dan membantu anggota untuk tujuan-tujuan positif dan menghindari hal-hal yang tidak produktif.
- d. Menjaga kekompakan tim. Pemimpin selalu menjaga kekompakan tim dan tidak ingin terjebak dalam pemikiran anggota.

Menghargai perbedaan dan keyakinan. Pemimpin menghargai setiap perbedaan pendapat untuk tujuan ke arah yang lebih baik, dan mengajak seluruh anggotanya untuk menghormati perbedaan dan keyakinan

2.6 Teori Pembangunan

Pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Tjokrowinoto, Moejiarto. 2007:15), untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan pengertian pembangunan menurut beberapa ahli

Siagian (2008:21) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara

sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)

Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan negara lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan dihormati.

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi : (Kessa, 2015 : 19)

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

2.7 Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati

Pembentukan desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan desa adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Kepala desa adalah pemimpin tertinggi dalam sebuah pemerintah desa. Seorang kepala desa hanya menerima koordinasi dari camat, akan tetapi hal tersebut bukan seperti sebuah tanggung jawab kepada camat. Setiap desa di Indonesia memiliki banyak nama lain untuk jabatan kepala desa, sebagai contoh pada wilayah Sumatera Barat kepala desa disebut juga dengan wali nagari. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun masa kerja dan dapat diperpanjang untuk satu kali jabatan lagi. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat, siapa saja bisa menjadi kepala desa pada sebuah desa selama orang tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Namun sering sekali terjadi kekeliruan antara kepala desa dan lurah. Perbedaannya lurah adalah seorang pegawai negeri sipil yang memiliki tanggung jawab kepada camat

Sedangkan kepala desa boleh menjadi salah satu dari anggota politik, akan tetapi tidak boleh menjadi pengurus dari partai politik tersebut. Disamping kewenangan dan hak yang dimiliki kepala desa, dalam konteks Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas, kepala desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
4. Menetapkan peraturan desa;
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;

7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. Mengembangkan sumberpendapatan desa;
9. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
10. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
11. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
12. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
13. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas kepala desa yang paling utama adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang di limpahkan kepada desa. Peraturan mengenai pemerintahan desa juga terdapat dalam undang-undang. Oleh karena itu seluruh tugas, kewajiban, wewenang hingga hal yang dilarang untuk kepala desa telah disusun dalam undang-undang. Seorang pemimpin desa juga memiliki hal-hal yang dilarang oleh peraturan undnag-undang negara Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Metode penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2019 : 16).

Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2012 : 13). Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan seberapa besar Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil sebaran kuesioner dan analisis mengenai Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi diperoleh angka R^2 (*R Square*) atau disebut koefisien determinasi adalah sebesar 0,463 atau sama dengan 46,3% (Rumus untuk menghitung koefisiensi determinasi *Model Summary*, ialah $r^2 \times 100\%$). Angka tersebut mempunyai arti bahwa besarnya pengaruh variabel Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Pembangunan Desa adalah 46,3% sedangkan 53,7% sisanya yaitu dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Peran kepemimpinan kepala desa didalam pembangunan desa merupakan penentu maju dan tidaknya sebuah desa, apakah desa bisa maju seperti desa-desa yang dekat dengan ibu kota kabupaten. Oleh karenanya, diperlukan kualitas dari seorang kepala desa dalam

mengorganisir dan mengkoordinir aparatur pemerintah desa bekerja untuk kepentingan pembangunan desa.

Untuk menjadi pemimpin, seorang kepala desa harus mempunyai peran penting dalam kepemimpinannya. Hal tersebut dilakukan supaya kepala desa mempunyai wibawa yang dapat menghasilkan pengaruh terhadap bawahannya untuk bekerja sesuai dengan tugasnya dalam pencapaian tujuan bersama yaitu pembangunan desa.

Untuk mengukur dan mengetahui kepemimpinan kepala desa di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi melalui dimensi Memiliki strategi yang jelas, Kepedulian, Merangsang anggota, Menjaga kekompakan tim, dan Menghargai perbedaan dan keyakinan. Berikut data responden mengenai tanggapannya dalam variabel X (kepemimpinan) menunjukkan intepretasi skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,88, artinya bahwa kepemimpinan kepala Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi ini dikatakan baik. Untuk indikator paling tinggi ada pada indikator Pemimpin Merangsang anggota untuk pembangunan, dengan interpretasi skor sebesar 4,05 Sedangkan untuk indikator yang paling rendah ada pada Indikator Pemimpin Menjaga kekompakan dengan interpretasi skor sebesar 3,61.

Pembangunan Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Pembangunan Desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi : Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, Pelayanan kesehatan Desa, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, Pelestarian lingkungan hidup, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Berikut data responden mengenai tanggapannya dalam variabel Y (Pembangunan Desa) menunjukkan intepretasi skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,74, artinya bahwa Pembangunan Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi ini dikatakan baik. Untuk indikator paling tinggi ada pada indikator Pelestarian lingkungan hidup, dengan interpretasi skor sebesar 4,15 Sedangkan untuk indikator yang paling rendah ada pada Indikator Pelayanan kesehatan Desa dengan interpretasi skor sebesar 3,06.

Besaran Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Pembangunan Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat Koefisien Korelasi antara variabel Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Pembangunan Desa adalah sebesar 0.680 berarti Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Pembangunan Desa terdapat hubungan yang Kuat, dan diperoleh angka R^2 (*R Square*) atau disebut koefisien determinasi adalah sebesar 0,463 atau sama dengan 46,3% (Rumus untuk menghitung koefisiensi determinasi *Model Summary*, ialah $r^2 \times 100\%$). Angka tersebut mempunyai arti bahwa besarnya pengaruh variabel Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Pembangunan Desa adalah 46,3% sedangkan 53,7% sisanya yaitu dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan angka korelasi R sebesar 0.680 berarti

Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Desa terdapat pengaruh yang Kuat, hal ini dikarenakan kepala desa dalam memimpin desa Mudik Ulo sudah baik, kepala desa memiliki strategi yang jelas, peduli, mampu membangkitkan anggota kerja untuk lebih semangat dan menjaga kekompakan bahu membahu dalam membangun desa Mudik Ulo. Berarti hipotesis H_1 yang menduga Kepemimpinan Kepala Desa Berpengaruh terhadap Pembangunan Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi terbukti kebenarannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang tiada henti untuk Penulis Ayahanda Kardion dan Ibunda Teti Marlita tercinta yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat m memberiku semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Ir.Hj.Elfi Indrawanis,MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Zul Ammar,SE.,ME Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Desriadi,S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si, Selaku dosen pembimbing I, Bapak Sahri Muharam, S.Sos, M.Si, Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu administrasi Negara*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta
- Fahmi, Irham. 2014. *Managemen Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi*. Alfabeta. Jakarta.
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Kurdi, 2011. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ridwan, 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rivai, Veithzal, 2014. *Kepemimpinan Dan Prilaku Organisasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Siagian, Sondang, P. 2012. *Teori Pengembangan Organisasi*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Adminitrasi Pembangunan*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Syafie, Kencana Inu, 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Tjokrowinoto, Moejiarto. 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Usman Effendi. 2014. *Asas Manajemen*, cetakan Ke II. Jakarta: Rajawali Pers
- Wursanto. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. : Andi : Yogyakarta

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembanguna Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.